

Implementasi *Good Local Governance* di Kota Pangkalpinang pada Kepemimpinan Walikota Maulan Aklil

Irvan Ansyari^{a,1}, Robing^{b,2}

^a Universitas Bangka Belitung

^b Universitas Bangka Belitung

¹ irvan@ubb.ac.id; ² Robing@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 September 2023

Direvisi: 28 Oktober 2023

Disetujui: 14 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Kata Kunci:

Good Local Governance

Kepemimpinan

Administrasi publik

ABSTRAK

Good local Governance adalah salah satu bentuk tata pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal yang menganut beberapa prinsip, salah satunya prinsip keterbukaan. Pemerintahan daerah yang baik juga termasuk isu yang paling actual dalam pengelolaan tata Kelola pemerintahan saat ini, terutama tentang pergeseran peran birokrat yang dahulunya sebagai orang yang ingin dilayani menjadi sebuah alat negara yang harus melayani masyarakat yang memang sudah membayar mereka melalui pajak. Salah satu prinsip dari *good local governance* adalah prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab, yang berarti pemerintah sebagai pengelola administrasi publik wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka kepada masyarakat yang harus dilakukan seperti layaknya konsumen. Berangkat dari fenomena yang terjadi hingga saat ini di Kota Pangkal Pinang, dimana selama kepemimpinan Maulan Aklil sebagai Walikota banyak menghasilkan prestasi diantaranya di bidang tata Kelola pemerintahan. Salah satu penghargaan yang diterima secara konsisten adalah pemerintah kota Pangkal Pinang menerima predikat Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini berarti menunjukkan Kota Pangkal Pinang memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik. Penghargaan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil melaksanakan salah satu prinsip *Good Local Governance* dalam pengelolaan tata pemerintahan dan administrasi publik, hal ini tentu saja tidak lepas dari kepemimpinan Walikota Maulan Aklil dalam memimpin Kota Pangkal pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Good Local Governance* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dimana Kota Pangkal Pinang konsisten menerima penghargaan WTP. Hal ini membuat penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan nantinya bisa jadi referensi bagi daerah-daerah lain. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

ABSTRACT

Keywords:
Good Local Governance
Leadership
Public Administration

Good local governance is a form of government management at the local level that adheres to several principles, one of which is the principle of openness. Good regional governance is also the most prominent issue in the management of public administration today, especially regarding the shift in the role of bureaucrats from being people who want to be served to becoming an instrument of the state that must serve the people who already pay them through taxes. One of the principles of good local governance is the principle of accountability or responsibility, which means that the government as the manager of public administration is obliged to be responsible for their work towards the community, which must be carried out like consumers. Departing from the phenomenon that has occurred to date in Pangkal Pinang City, where during Maulan Aklil's leadership as Mayor he produced many achievements, including in the field of governance. One of the awards consistently received is that the Pangkal Pinang city government received the title of Unqualified Opinion (WTP) from the Financial Audit Agency. This means that Pangkal Pinang City has good financial performance accountability. The award indicates that the Pangkal Pinang City Government has succeeded in implementing one of the principles of Good Local Governance in managing governance and public administration, this of course cannot be separated from the leadership of Mayor Maulan Aklil in leading Pangkal Pinang City. This research aims to determine the implementation of Good Local Governance implemented by the Pangkal Pinang City Government, where Pangkal Pinang City consistently receives WTP awards. This makes this research important to carry out and it is hoped that it can later become a reference for other regions.

©2024, Authors Irvan Ansyari, Robing
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Keberagaman diberlakukannya peraturan Perundang-undangan No 22 Tahun 1999 mengimplikasikan adanya otonomi daerah, dimana daerah berhak mengurus kebutuhan daerah mereka masing-masing tanpa penyelenggaraan pemerinhan yang terpusat ataupun sentralistik seperti masa sebelumnya. Otonomi daerah tentu saja membuat daerah lebih berdaya sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang, sehingga ada kebebasan bagi daerah untuk memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya sendiri.

Tata kelola daerah yang baik ialah salah satu masalah ataupun isu yang paling menonjol dalam tata Kelola pemerintahan pada saat ini. Tuntutan masyarakat yang kuat terhadap pengelolaan pemerintahan daerah yang baik, di samping tuntutan globalisasi, sejalan dengan semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat. Pergeseran paradigma pemerintahan yang sedang berlangsung dari *rolling governance* ke *good governance* dipahami sebagai dinamika fenomena dari sistem demokrasi yang berkeadilan. Buruknya cara kerja birokrasi yang lambat dan lemah menjadi salah satu penyebab kemajuan yang tidak signifikan dalam mengatasi krisis (Setiyono, 2010). Kunci dari transformasi tersebut yaitu konsep pelayanan birokrasi, yang tidak lagi berorientasi kepada melayani atasan, ataupun tunduk kepada struktur birokrasi berjenjangnya ala weber, akan tetapi harus melayani Masyarakat yang dalam paradigma baru reformasi birokrasi itu mesti diperlakukan sebagai layaknya konsumen (Setiyono, 2010).

Konsep pemerintahan yang baik itu sendiri adalah proses pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan, menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya memberikan

pelayanan kepada masyarakat (Nugroho, 2016). Penerapan praktik tata kelola yang baik terjadi dalam beberapa tahap berdasarkan kemampuan pemerintah dan sistem peraturan.

Munculnya fenomena baru dimana peran birokrasi berubah dari pelaksana, promotor, dan penggerak pembangunan, lalu semakin terbatasnya sumber daya atau kemampuan obyektif pemerintah daerah, memunculkan gagasan untuk meniru kelompok swasta yang masih ada, bahkan di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas. (Lamangida, 2018) Untuk bertahan dalam situasi ini, kita juga perlu mendefinisikan kembali makna dan sifat layanan publik dan menciptakan organisasi pemerintah daerah yang ramping namun kuat dan efisien. Bertransformasi menjadi birokrasi yang berorientasi pada prestasi, mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, memprioritaskan manfaat dibandingkan hasil, dan memiliki orientasi pada satu tujuan yang sudah ditetapkan Bersama secara demokratis. System pelayanan publik yang sebelumnya adalah layanan secara structural, formalitas, menjadi system yang berorientasi kepada pasar dan persaingan sehingga birokrasi bekerja secara maksimal (Hawari et al., 2023). Oleh karena itu, budaya birokrasi harus mampu mendorong tumbuhnya budaya demokrasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik yang biasanya ditangani melalui mekanisme administratif menjadi pemberian pelayanan publik berdasarkan insentif pasar (Muhamad Adian Firmas, 2002).

Berangkat dari fenomena yang terjadi hingga saat ini di Kota Pangkal Pinang, dimana selama kepemimpinan Maulan Aklil sebagai Walikota banyak menghasilkan prestasi diantaranya di bidang tata Kelola pemerintahan. Salah satu penghargaan yang diterima secara konsisten adalah pemerintah kota Pangkal Pinang menerima predikat Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal Pinang memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik.

Prestasi Kota Pangkal Pinang ini menunjukkan kalau pemerintah mampu melaksanakan tata Kelola proses pemerintahan dengan baik, salah satunya adalah adanya akuntabilitas yaitu tanggung jawab dari pemerintah khususnya dalam konteks ini dalam pengelolaan keuangan daerah. System otonomi daerah tentu saja banyak menimbulkan masalah baru khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah korupsi di daerah, adanya penghargaan ini yang diterima selama 5 kali berturut-turut mengindikasikan bahwa Kota Pangkal Pinang berhasil dalam pengelolaan keuangan atau secara garis besar berhasil menerapkan prinsip *good governance*.

Ada beberapa daerah di Indonesia yang dinilai mampu menerapkan *good governance* mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Sumatera Barat yang berhasil mengkolaborasikan kearifan lokal dengan pelaksanaan *Good Governance* (Malau, 2013). Pelaksanaan pemerintahan lokal di Sumatera Barat yang berbasis local wisdom memberi warna tersendiri terhadap partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dimulai dengan adanya peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 perihal tata pemerintahan di Tingkat nagara yang berusaha untuk mengkolaborasikan peraturan dengan kearifan lokal (Malau, 2013). Hal ini menunjukkan kebijakan dan kreatifitas pemerintah lokal dalam memikirkan sebuah *Policy* yang memang mewakili kondisi sosial politik dalam masyarakatnya sehingga kebijakan yang dibuat akan membuat perubahan dengan kreativitas yang ada.

Kota Pangkalpinang termasuk kota yang di proyeksikan untuk menjadi *smart city*. Artinya beberapa prinsip tata Kelola memang harus dijalankan dengan baik. Ada beberapa perubahan yang signifikan dari wajah kota Pangkalpinang sejak dipimpin oleh walikota Maulan Aklil. Salah satu perubahan yang terlihat adalah arus investasi yang begitu tinggi

bahkan Ketika pandemi, sehingga sangat membantu perekonomian lokal (Heru, 2022). Dari beberapa fenomena diatas kita berasumsi bahwa pola kepemimpinan akan mempengaruhi tata Kelola pemerintahan, sehingga ada relasi yang cukup kuat antara kepemimpinan dengan pelaksanaan *Good Local Governance*. Sejauh ini studi kepemimpinan lebih banyak mendalami soal kepemimpinan dalam Perusahaan ataupun kepemimpinan politik, sehingga mengkolaborasikan teori kepemimpinan dengan tata Kelola menjadi studi yang menarik untuk dijadikan kajian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan peneletian. Metode peneletian kualitatif adalah sebagai proses riset yang menghasilkan output berupa data yang bersifat deskriptif dimana datanya berasal dari pengamatan dan observasi terhadap fenomena di sekitar (Moleong, 2013). Paradigma interpretatif memandang realitas sosial sebagai suatu keseluruhan, kompleks, dinamis, dan bermakna, bukan sebagai sesuatu yang terpisah penuh makna subjektif, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik. Kemudian, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan suatu desain yang cocok untuk beberapa keadaan. Sejalan dengan tujuan penelitian dan uraian yang telah disampaikan, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana implementasi *good local governance* di Kota pangkal pinang pada Kepemimpinan Maulan Aklil.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi *good local governance* di Kota pangkal pinang pada Kepemimpinan Maulan Aklil. Selanjutnya peneliti memilih Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai objek penelitian karena pada masa kepemimpinan Maulan Aklil, Kota Pangkal Pinang memperlihatkan banyak perubahan dan perkembangan yang signifikan salah satunya yaitu di bidang pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari *good local governance* dalam pengelolaan pemerintahan lokal.

Teknik pengumpulan sumber data yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khususnya adalah orang yang dipilih sebagai narasumber atau informan dianggap sebagai orang yang paling berpengetahuan atau kompeten khususnya tentang implementasi *good local governance* di Kota Pangkal Pinang.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep *Good Local Governance*

Maksud dari "*governance*" adalah tata Kelola dan hubungan antara Lembaga lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi (J. et al., 2003). Syarat bagi tercapainya "*good governance*" adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Dunn, 2018). Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sebagai antisipasi atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi akuntabilitas dan pemeriksaan eksternal itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai salah satu pilar bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Agar pemerintah mampu melaksanakan fungsinya yang bercirikan *good governance*, maka perlu diciptakan suatu kerangka

administrasi publik yang mengandung unsur-unsur tertentu agar tercipta suatu sistem kooperasi serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Menurut *Institute on Governance* (1996), untuk menciptakan “good governance” perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut: (Muhamad Adian Firnas, 2002)

1. Kerangka Kerja tim antar organisasi
2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan
3. Pemahaman komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab Bersama
4. Adanya dukungan dan system imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko
5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal
6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat, adanya publik yang mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan bersikap tidak memihak (non partisan).

United Nations Development Programme (UNDP) mempunyai pandangan mengenai prinsip-prinsip good governance, yang menyatakan bahwa ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam praktik good governance antara lain: (Rosika & Frinaldi, 2023)

1. Partisipasi: Setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
2. Supremasi hukum: Aturan hukum dan kerangka legislatif harus diterapkan dan dipatuhi secara adil dan sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi: adanya proses dan kebebasan dalam hal aliran informasi. Berbagai proses, informasi tentang proses pemerintahan diakses secara bebas oleh Masyarakat
4. Daya tanggap: setiap stakeholder harus responsive terhadap masalah masalah kompleks yang ada di Masyarakat
5. Berorientasi consensus: Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan: Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia
8. Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
9. Bervisi strategis: Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (Human Development).

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan melibatkan perilaku seseorang mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku pengikutnya. Kekuasaan dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: (1) kekuasaan ahli; (2) kekuasaan hukum; (3) kekuasaan rujukan; (4) kekuasaan imbalan; (5) kekuasaan memaksa. (Mulyono, 2018) Selain soal

kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya penelitian untuk membedakan karakteristik kepemimpinan seringkali menemui jalan buntu. Laporan tersebut juga mencatat bahwa upaya untuk mengidentifikasi serangkaian karakteristik yang membedakan pemimpin dari pengikutnya, dan pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif, sebagian besar telah gagal. Hasil yang paling dapat diterima adalah penelitian yang hanya bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang secara konsisten relevan dengan kepemimpinan Masyarakat.

Berbicara perihal kepemimpinan ilmu politik dan pemerintahan pemimpin politik adalah orang yang dipilih berkala oleh Masyarakat secara demokratis, tujuannya jelas yaitu untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam Masyarakat. Jabatan-jabatan eksekutif Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota adalah contoh beberapa pemimpin dengan jabatan politik, mendapat mandat dari Masyarakat dan memiliki legitimasi untuk menjalankan proses pemerintahan. Dalam menjalankan proses pemerintahan tentu banyak dinamika dari seorang pemimpin, sebagai pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang baik tentu mereka harus menjalankan proses input hingga proses output dari sebuah kebijakan yang baik, termasuk menjalankan pemerintahan dengan penuh kreativitas dan sangat mengetahui kebutuhan Masyarakat secara menyeluruh. Dari gambaran tersebut kita bisa mengatakan maju atau tidaknya suatu daerah, ada perubahan atau tidaknya suatu wilayah bisa dikatakan sebagai hasil kerja dari proses kepemimpinan dari Kepala Daerah di daerah tersebut.

Perubahan Kota Pangkalpinang

Kepemimpinan Walikota Maulan Aklil sejak 2018 membawa banyak perubahan di Kota Pangkalpinang. Ada beberapa perubahan wajah kota pangkalpinang yang bisa dilihat dengan kasat mata. Merujuk pada teori ataupun indikator *good governance* kita dapat menganalisis. Sebagian besar indikator tersebut terlaksana dengan baik di Kota Pangkalpinang, apalagi Kota Pangkalpinang sempat menjadi rujukan untuk *Sustainable City* (kota pintar) pendapat dari (Faberta, 2022).

Sebelum masuk ke beberapa perubahan besar, kepemimpinan Walikota dalam merubah kultur juga menjadi salah satu factor yang berperan:

“Kultur. Kulturenya. Makanya strategi kami kemarin, salah satu ini, di *Good Local Governance* pas tahun dulu, adalah bagaimana struktur merubah kultur. Struktur merubah kultur. Contoh, kita dulu bikin ball art itu, Bagaimana kita mengedukasi masyarakat melalui ball art itu agar tidak parkir sembarangan, tidak jualan di trotoar, terus tidak buang sampah sembarangan demi keindahan yang didapat, dan yang paling penting untuk *sefety* para pejalan kaki. Itu salah satu contoh yang kita terapkan. Jadi, kultur rasa sayang itu dibangun. Dulu buang sampah sembarangan, pangkalpinang sampahnya dulu di setiap sudut kota, orang membuang sampah sembarangan. Bagaimana mengedukasi itu? Salah satunya adalah smerubah kultur tersebut, kita beli mobil sampah, Satgas smile kita bikin dulu kan, dimana setiap keluaran ada dua mobil sampah yang kita cat warna pink. satunya warna kuning. Mana yang lebih akan dijaga? Pasti kan tercipta di image kita warna pink itu, gak mau kotor lah, kita akan lebih menjaga warna pink. Nah, itu salah satu kita juga merubah, mindset-nya. Orang gak sadar tentang itu. Menciptakan market itu lebih susah daripada menciptakan produk. Mulai dari kata-kata itu juga. Kulturenya, bahwa kita dulu orang bangsa tidak konsumtif. Kalau ada duit, mereka mending beli pisang lalu digoreng, daripada membeli langsung pisang goreng” (Aklil, 2023).

Intinya, sebelum merubah tata Kelola kota walikota mempunyai mindset bahwa mengubah kultur Masyarakat menjadi yang lebih baik adalah salah satu kuncinya. Ini merupakan hasil dari proses kepemimpinan yang baik. Adanya kebijakan kemudian diimplementasikan membuat sebuah perubahan dapat dilaksanakan, perubahan-perubahan terlihat sejak Maulan Aklil memimpin tahun 2018. Seperti mempermudah arus investasi melalui peraturan daerah (Heriyanto & Lionardo, 2022). Hasilnya jelas, Ketika investasi seperti Indomaret, Alfamart, Transmart, Pizza Hut yang sebelumnya tidak ada, kemudian masuk ke kota pangkalpinang dan memberi warna baru terhadap kegiatan perekonomian dan UMKM dampaknya, arus investasi tetap stabil di Kota Pangkalpinang meski sempat dilanda pandemi Covid 19 (Heru, 2022).

Kota Pangkalpinang dan Standar Good Governance

Berbicara *Good Governance* tentu kita juga berbicara mengenai standar-standar *Good Governance* yang pernah dicanangka oleh UNDP bebarapa standar yang sudah dibicarakan diatas menjadi dasar untuk menganalisis kinerja ataupun implementasi sebuah kebijakan dalam proses demokratisasi. Dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di lapangan berikut adalah beberapa praktik *Good Governance* yang dominan dilakukan selama kepemimpinan walikota Maulan Aklil

Tabel 1 Good Governance di Kota Pangkalpinang

No	Good Governance di Kota Pangkalpinang		
	Prinsip Good Governance	Implementasi	Hasil
1	Transparansi	Program ngopi Pekat,	Jemput Bola
2	Visi Strategis	Mempermudah arus investasi	Bersinergi dengan pengusaha, UMKM
3	Efektifitas dan Efisiensi	Membuat peraturan	Penghargaan wajar tanpa pengecualian
4	Partisipasi	Program Ngopi Pekat, menyediakan waktu untuk masyarakat	Aspirasi masyarakat ditampung dengan baik, sehingga kultur berubah menjadi lebih baik

Tabel di atas adalah manifestasi dari wawancara langsung dengan walikota, Masyarakat, dan pengamatan lapangan terhadap kota Pangkalpinang. Wawancara langsung sekaligus pengamatan dan informasi dari informan triangulasi ini menjawab asumsi-asumsi peneliti sebelum turun ke lapangan. Ada beberapa perbedaan dan perubahan yang dilakukan oleh Walikota Maulan Aklil selama memimpin Kota Pangkalpinang 2018-2023 salah satu yang paling mencolok adalah wajah kota Pangkalpinang yang berubah signifikan, ini disebabkan oleh arus investasi yang masuk. Jika sebelumnya arus investasi tertutup, Maulan Aklil menerbitkan perda yang memancing masuknya arus investasi. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang No 15 Tahun 2019 yang semakin mempermudah arus investasi. Perda ini adalah salah satu hasil kebijakan yang akhirnya membuat perkembangan

signifikan di Kota Pangkalpinang, pemerintah melalui Perda ini memancing investasi dengan melakukan pemberian intensif kepada penanam modal melalui pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Kota Pangkalpinang (Pangkalpinang, 2019).

Dengan masuknya arus investasi maka secara tidak langsung masyarakat menjadi konsumtif, dan itu sangat baik bagi perkembangan ekonomi di tingkat lokal karna berkaitan dengan perputaran uang. Ini yang disampaikan oleh Maulan Aklil dalam suatu wawancara

Nah, gimana supaya konsumtif ? Hadirlah, alfamart, indomaret awal market. Ada gula, ada semut. Nah, dengan seperti itu, terus mereka tanpa sadar. Satu pegawai alfamart indomaret itu rata-rata 10 karyawan. Nah, begitu hadirnya itu pola konsumtif masyarakat mulai terbangun. selanjutnya Nah, Dengan hadirnya yang seperti itu akhirnya akan memancing awal pizza hut. MDonald, DIY, XXI dll. Ikut semua, ya. Ikut, ya. Ikut, ya. hingg timbulah grab, gojek, maxim dan moda transportasi lainnya. sehingga UMKM juga tumbuh, tadinya Cuma 5.000 menjadi hampir 30.000. Dengan seperti itu, orang akhirnya pun, muteran duitnya, sama banyak. Orang kan datang ke sintambah banyak. Sehingga dulu jumlah penduduk kita ini, cuma 200rb Nah, sekarang 225.162 jiwa (Aklil, 2023).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keberanian pemerintah memancing Masyarakat untuk lebih konsumtif ternyata berpengaruh banyak terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang secara keseluruhan, selain tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan baik, sektor perekonomian Kota Pangkalpinang menjadi cenderung lebih stabil di berbagai situasi termasuk pandemi Covid19.

Kepemimpinan dan *Good Governance* di Kota Pangkalpinang

Memang belum banyak studi yang meneliti tentang hubungan kepemimpinan dan implementasi *Good Governance*. Tentu seperti yang dijelaskan diawal, kepemimpinan adalah hal yang sakral terutama dalam hal implementasi kebijakan publik. Apabila kepemimpinan tidak dilakukan dengan optimal, maka hasil dari kebijakan publik juga tidak akan sesuai dengan sebagaimana mestinya

Dalam hal ini Walikota Maulan Aklil berhasil melaksanakan gaya kepemimpinan yang efektif demi terciptanya perubahan di Kota Pangkalpinang. Hasil wawancara membuktikan bahwa pertama kali memimpin Walikota mempelajari kultur Masyarakat kemudian pelan-pelan mengubah kultur Masyarakat tersebut menjadi kultur yang baik. (Aklil, 2023). Ini dilakukan dengan adanya aksi jemput bola, dan yang paling penting membuat hubungan timbal balik dengan Masyarakat melalui beberapa program kreatif yang digagas oleh pemerintah. Program-program kreatif ini terbukti mampu memberikan symbiosis mutualisme antara pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan Masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Walaupun secara umum prinsip-prinsip *Good Governance* di atas belum terlaksana secara merata, akan tetapi ada perubahan dan implementasi dari beberapa prinsip-prinsip yang mencolok di Kota Pangkalpinang

Lalu apa hubungan Kepemimpinan dengan Implementasi *Good Governance*? Tentu kalau melihat hasil dan perubahan kota Pangkalpinang selama kepemimpinan Maulan Aklil, dua hal ini berhubungan erat. Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dengan melaksanakan inovasi dalam proses kepemimpinan maka prinsip-prinsip *Good Governance* itu akan berjalan dengan baik. Kepempimpinan jemput bola membuat semua aspirasi Masyarakat terserap, kepemimpinan yang visioner dan berani membuat adanya perubahan-perubahan baru terhadap wajah kota, bahkan sektor perekonomian yang stabil melalui sebuah kebijakan publik dari pejabat politik yang berkuasa (Walikota).

4. Kesimpulan

Good local Governance adalah salah satu bentuk tata pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal yang menganut beberapa prinsip, salah satunya prinsip keterbukaan. Pemerintahan daerah yang baik juga merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, terutama tentang pergeseran peran birokrat yang dahulunya sebagai orang yang ingin dilayani menjadi sebuah alat negara yang harus melayani masyarakat yang memang sudah membayar mereka melalui pajak. Salah satu prinsip dari *good local governance* adalah prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab, yang berarti pemerintah sebagai pengelola administrasi publik wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka kepada masyarakat yang harus dilakukan seperti layaknya konsumen.

Sejak kepemimpinan Maulan Aklil mulai tahun 2018, Kota Pangkalpinang mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan yang ada pada kota Pangkalpinang adalah perpaduan antara proses kepemimpinan yang transformatif dan proses kebijakan publik yang melibatkan Masyarakat disana. Ada beberapa prinsip *Good Governance* yang setelah dilakukan penelitian berhasil diterapkan di Kota Pangkalpinang diantaranya adalah transparansi, visi strategis, efektifitas, dan partisipasi Masyarakat. Kunci dari semua perubahan yang ada adalah dengan memadukan proses kepemimpinan yang baik dengan beberapa prinsip *Good Governance*, sehingga ada dampak positif dari proses kepemimpinan terhadap pelaksanaan tata Kelola pemerintahan di tingkat lokal.

5. Ucapan Terima Kasih

Riset tentang *Good Local Governance* ini ditulis oleh (Irvan Ansyari, Robing, Universitas Bangka Belitung) berdasarkan hasil penelitian (Implementasi *Good Local Governance* di Kota Pangkalpinang pada masa Kepemimpinan Maulan Aklil) dihasilkan dari Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bangka Belitung, Program Peneliti Muda (PPM). Isi sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab Penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Bangka Belitung yang telah menyediakan dana dalam program peneliti muda ini, sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Jurusan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam bentuk sumbangan pemikiran hingga penelitian ini selesai.

6. Daftar Pustaka

- Aklil, M. (2023). *Wawancara dengan Maulan Aklil*.
- Bouckaert, G (2023). Effective local governance. Handbook on Local and Regional Governance, books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=R--nEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA26&dq=good+local+governance&ots=KVRfcJ8mYt&sig=BgdNe57az9hrVi2_1Abo3AgD9yU
- Cárcaba, A, Arrondo, R, & González, E (2022). Does good local governance improve subjective well-being?. *European Research on Management ...*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000516>
- Dunn, W. N. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Faberta, T. R. (2022). *Luncurkan Smart Room City, Langkah Pangkalpinang Menuju Kota Pintar*. <https://www.faktaberita.co.id/luncurkan-smart-room-city-langkah-pangkalpinang-menuju-kota-pintar/>
- Frey, K (2023). Development, good governance, and local democracy. *Brazilian Political Science Review*, SciELO Brasil, <https://www.scielo.br/j/bpsr/a/fqBSCy6wDzd3nh4Fz9GWTp/?lang=en>

- Gobang, YKGD, Nabung, A, & Tapung, MM (2022). Critical Discourse on Press Contribution to NTT Good Local Governance. *Jurnal ASPIKOM*, jurnalaspikom.org, <http://www.jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/1169>
- Handayani, E, Garad, A, Suyadi, A, & ... (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development ...*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772655X23000472>
- Hawari, A., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Implementation Of Change Management In Public Services Innovation In Bogor City. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 271–289. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2821>
- Heriyanto, U., & Lionardo, A. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 75–91. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1797>
- Heru, D. (2022). *Meskipun Pandemi, Nilai Investasi di Pangkalpinang Capai Rp 3,3 Triliun* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul “Meskipun Pandemi, Nilai Investasi di Pangkalpinang Capai Rp 3,3 Triliun”, *Klik untuk baca:* <https://money.kompas.com/read/2022/03/18/130000826/meskipun-pandemi-nilai-investasi-di-pangkalpinang-capai-rp-3-3-triliun>
- J., G., B., A., & T., P. (2003). Principles for Good Governance in the 21st century. *Policy Brief*, 15.
- Kniec, W, & Goszczyński, W (2022). Local horizons of governance. Social conditions for good governance in rural development in Poland. *European Countryside*, sciendo.com, <https://doi.org/10.2478/euco-2022-0002>
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>
- Malau, H. (2013). Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat. *Tingkap*, 9(2), 126–140.
- Moleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Adian Firas. (2002). Implementasi Good Governance Melalui Reformasi Sistem. *Civil Service Journal*, 27–38. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/11>
- Mulyono, H. (2018). Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 290–297. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.93>
- Nuesiri, EO (2022). Good governance of local forest is neither easy nor cheap: Policy learning from Bimbia-Bonadikombo. *Forest Policy and Economics*, Elsevier, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934121002781>
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pangkalpinang, W. (2019). *PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*.

- Prasetyo, E, & Sugitanata, A (2022). Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, qaumiyyah.org, <http://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/49>
- Rahmatullah, A, Qamar, N, & Abbas, I (2023). Reconstruction of Principles of Good Governance Based on Local Wisdom in North Maluku Province. *Journal for ReAttach Therapy and ...*, jrtd.com, <https://www.jrtd.com/index.php/journal/article/view/1815>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Setiyono, B. (2010). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Undip Press.
- Zaitul, Z, Ilona, D, & Novianti, N (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, mdpi.com, <https://www.mdpi.com/2076-3387/13/1/19>

PROFIL SINGKAT

Irvan Ansyari, 081391713393

Adalah Dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, dengan fokus penelitian ke Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kebijakan Publik